

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Realisasi inflasi Provinsi Bali pada triwulan III 2021 masih berada pada level yang rendah yaitu 1,40% (yoy), namun meningkat dibandingkan triwulan II 2021 yang tercatat 0,58% (yoy). Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga di sebagian besar kelompok barang. Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi inflasi Nasional pada periode yang sama (1,60%; yoy). Selanjutnya, tekanan inflasi pada triwulan IV 2021 diperkirakan meningkat, didorong oleh perayaan hari raya Galungan dan Kuningan serta peningkatan tarif angkutan udara seiring dengan pembukaan pariwisata Bali. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Bali akan terus mengawal pergerakan harga sehingga inflasi tetap terkendali. Inflasi Provinsi Bali pada triwulan III 2021 tercatat sebesar 1,40% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 0,58% (yoy). Berdasarkan kelompok barang, melandainya inflasi terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan harga di sebagian besar kelompok, utamanya kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (RT). Peningkatan tekanan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terutama disebabkan oleh adanya penurunan pasokan dari sentra produksi. Meningkatnya tekanan pada kelompok ini, utamanya bersumber dari peningkatan harga komoditas daging ayam ras, minyak goreng, daging babi, ikan tongkol diawetkan, dan tomat. Peningkatan harga daging ayam ras sejalan dengan kebijakan normalisasi harga daging ayam ras yang dilakukan Pemerintah. Sementara itu, peningkatan harga minyak goreng dipengaruhi oleh tren naiknya harga minyak sawit dunia. Lebih lanjut, peningkatan harga daging babi, ikan tongkol dan tomat dipengaruhi oleh gangguan pasokan selama periode laporan

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Permasalahan pengendalian inflasi pada Triwulan III 2021 adalah laju peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tertahan oleh turunnya tekanan harga pada komoditas pisang, mangga, bawang merah, telur ayam ras, dan beras. Pasokan hortikultura bawang merah, buah-buahan (pisang dan mangga) dan beras meningkat sesuai dengan pola musimannya yang jatuh pada triwulan III 2021. Lebih lanjut, terjaganya pasokan komoditas hortikultura (terutama bawang merah) tidak terlepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam kerangka kebijakan pengendalian inflasi 4K, khususnya keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan dengan mendorong pemanfaatan Controlled Atmosphere Storage (CAS) sebagai tempat penyimpanan hortikultura. Sementara itu, turunnya harga telur ayam ras dipengaruhi oleh produksi yang melimpah seiring dengan peningkatan produksi di sentra produksi nasional.
- kenaikan harga dari kelompok core inflation. Secara umum, kenaikan harga canang sari sejalan dengan tingginya frekuensi kegiatan upacara keagamaan sepanjang bulan September 2021, yang dipercaya merupakan bulan baik oleh masyarakat Bali. Beberapa harga kebutuhan lainnya (seperti pipa, baju kaos berkerah pria, dan hand body lotion) juga tercatat mengalami peningkatan harga seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat selama perayaan Hari Keagamaan. Meski demikian, penurunan harga di triwulan III 2021 pada komoditas cabai rawit, cabai merah, dan angkutan udara mampu menahan peningkatan harga lebih lanjut.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Diadakan rapat terkait neraca pangan dengan Disperindag pada 12 Agustus 2021.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Controlled Atmosphere Storage (CAS) akan digunakan sebagai tempat penyimpanan komoditas inflasi dan akan ditempatkan di sentra-sentra produksi. Penyimpanan menggunakan CAS akan mampu menampung 1 ton hortikultura (seperti cabai, bawang merah/putih) selama kurang lebih 2 minggu. Melalui penggunaan CAS ini diharapkan akan mampu menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga sehingga tercapai stabilitas harga pangan di Bali. • Pada tanggal 25 Agustus 2021 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian (Rakornas) Inflasi 2021 bersama Kementerian/Lembaga yang tergabung pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Adapun dalam rapat disampaikan penghargaan TPID Awards kepada provinsi dan kabupaten/kota yang dianggap berhasil dalam merealisasikan pengendalian inflasi di daerah selama tahun 2020. TPID Kabupaten Badung dan TPID Kabupaten Bangli masuk sebagai nominasi pemenang dalam kategori TPID Kab/Kota Non IHK Berprestasi Tahun 2020 wilayah Jawa-Bali. Program unggulan dari masing-masing TPID adalah Nelayan Go Digital, MATANABE (Masyarakat Desa Tanam Cabe) dan SIBERTANI (Siswa Belajar Bertani) untuk Kab. Badung. Sedangkan TPID Kab. Bangli memiliki program unggulan KELOR BANGLI (Kebijakan Telor Kabupaten Bangli) yaitu pemetaan peluang pasar dan perumusan kebijakan stabilisasi terkait harga telur melalui digitalisasi, program pasar gotong royong dan KAD.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Bali pada Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut: a) Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dan koordinasi dengan TPID Prov. Bali dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di seluruh daerah di Bali. b) Perlunya dibangun penataan kelembagaan yang baik, proses yang baik, dan memiliki sistem yang baik untuk bisa sustainable. Sehingga, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, tidak terjadi masalah karena sudah memiliki prioritas dan sistem yang bisa berjalan sendiri. c) Mendorong implementasi teknologi baik dari sisi hulu maupun hilir, serta dalam pemasaran komoditas khususnya pada komoditas pertanian.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Bali pada Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut: a) Pemerintah Daerah bersama seluruh stakeholders yang tergabung dalam TPID melakukan implementasi roadmap pengendalian inflasi di masing-masing Provinsi yang sudah ditandatangani ketua TPID Provinsi dalam hal ini Gubernur Provinsi dan melakukan pelaporan evaluasi roadmap secara triwulanan. b) Melakukan pemenuhan pasokan untuk kebutuhan barang antar provinsi dan kelancaran transportasi distribusi barang yang berkelanjutan, khususnya melalui pelabuhan, dan melakukan komunikasi untuk menjaga ekspektasi masyarakat. c) Memberikan solusi untuk mengurangi mata rantai tata niaga, khususnya yang titik rantainya berada pada provinsi yang berbeda.